

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KOLABORARIF
DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNG**



JUDUL

**PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KINTOM
KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH**

OLEH :

ABDUL HAMID TOME.,SH.,MH/ Ketua

NUVAZRIA ACHIR, SH.,MH, NIDN. 0005108502/ Anggota

WENI ALMORAVID DUNGA.,SH.,MH/ Anggota

Biaya Melalui Dana RBA FAKULTAS HUKUM UNG, TA 2023

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)

1. Judul Kegiatan : PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN LUWUK SULAWESI TENGAH
2. Lokasi : KABUPATEN LUWUK SULAWESI TENGAH
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.
 - b. NIP : 198405012015041002
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Tata Negara / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340008338 / hamid.tome@ymail.com
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 2 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Nuvazria Achir, SH. MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Dr. Weny Almoravid Dunga, SH., MH /
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : PEMERINTAH KABUPATEN LUWUK SULAWESI TENGAH
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 266 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum.)
NIP. 196804091993032001



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG
(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

Gorontalo, 31 Juli 2023
Ketua

(Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.)
NIP. 198405012015041002

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| RINGKASAN | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Tujuan | 6 |
| 1.3 Manfaat Pelaksanaan Program..... | 6 |
| BAB II TARGET DAN LUARAN PROGRAM..... | 7 |
| 2.1 Target..... | 7 |
| 2.2 Luaran Program | 7 |
| BAB III METODE PELAKSANAAN..... | 9 |
| 3.1 Persiapan dan Pembekalan | 9 |
| 3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif | 10 |
| 3.3 Rencana Aksi Program..... | 11 |
| BAB IV HASIL KEGIATAN | 12 |
| 4.1 Profil Sekolah..... | 12 |
| 4.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan | 12 |
| BAB V PENUTUP..... | 15 |
| 5.1 Kesimpulan | 15 |
| 5.2 Saran | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA | 16 |
| LAMPIRAN..... | |

RINGKASAN

Menjadi hal yang lazim disetiap menjelang Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, salah satu topik yang dibahas ialah keberadaan Pemilih Pemula. Mereka ialah Warga Negara Indonesia yang disaat hari waktu pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan mempunyai hak pilih berdasarkan ketentuan UU Pemilu. Ciri pemilih pemula antara lain; belum pernah melakukan penentuan suara di TPS, tidak memiliki pengalaman memilih, kurang rasional, penuh gejolak dan semangat, ingin tahu, serta poin penting adalah menjadi sasaran peserta pemilu sebab memiliki jumlah cukup besar. Tak dipungkiri, pemilih pemula menjadi incaran kontestan Pemilu, baik partai politik ataupun secara personal pendukungnya. Pemilih pemilu dianggap rentan untuk dipengaruhi dan mudah diarahkan serta menjaring teman lainnya. Kebanyakan dari pemilih pemula masuk kategori dengan latar belakang semu, dimana masih ikut-ikutan seperti teman seusia, sehingga masih rawan dipengaruhi jalan pikirannya. Sebagai generasi penerus, mereka harus belajar dan dipahamkan tentang pentingnya Pemilu untuk mendorong rasa partisipasi yang tinggi, sebab menjadi pengalaman pertama dalam keikutsertaan pesta demokrasi yang turut menentukan nasib bangsa ke depan.

Oleh karena itu, Perguruan Tinggi selaku penyelenggara pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo perlu melaksanakan suatu program berupa pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula, termasuk Bekerjasama Dengan Mitra Sehubungan Dengan Konsultasi dan Pendampingan Terhadap Masalah yang Dihadapi Pemerintah Daerah dan atau Sekolah. Manfaat pelaksanaan program guna menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat dan memberi sumbangsih pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat maupun siswa untuk kemajuan pembangunan daerah dan bangsa, serta penerapan keilmuan dosen.

Kata Kunci : Politik; Pemilih Pemula; Pemilihan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia perpolitikan di Indonesia khususnya kaitannya dengan proses pemilihan pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah ada regulasi (undang-undang) yang mengaturnya. Awalnya dalam memilih pejabat negara hanya sebatas lembaga legislative yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten maupun Kota. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan berdasarkan Amandemen ketiga Konstitusi (perubahan ke-3 tahun 2001), juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dimulai pada tahun 2004. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Selain Pemilihan di tingkatan pusat dalam hal ini pemilu legislatif dan presiden, juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati yang juga dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerahnya.

Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen¹ ialah kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara sama dengan kehendak para subyek hukum. Hal serupa dikatakan William Andrews², bahwa negara demokrasi modern berdiri di atas dasar kesepakatan umum (mayoritas) rakyat tentang bentuk negara yang diimpikan. Negara

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerbit Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006, (hlm : 402-409)

² Prof. Jimly Asshddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, (hlm : 398-399)

diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang ideal.

Membahas isu politik, terdapat istilah menarik yakni “*Demokrasi Langsung*” yang berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana setiap warga negara bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi pendapat bahkan keinginannya. Bentuk ini dapat dikatakan proporsional, sebab pemilih bisa berhadapan langsung dengan wakilnya yang akan duduk di parlemen maupun pucuk pimpinan nanti.³

Menjadi hal yang lazim disetiap menjelang Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, salah satu topik yang dibahas ialah keberadaan Pemilih Pemula. Mereka ialah Warga Negara Indonesia yang disaat hari waktu pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan mempunyai hak pilih berdasarkan ketentuan UU Pemilu. Ciri pemilih pemula antara lain; belum pernah melakukan penentuan suara di TPS, tidak memiliki pengalaman memilih, kurang rasional, penuh gejolak dan semangat, ingin tahu, serta poin penting adalah menjadi sasaran peserta pemilu sebab memiliki jumlah cukup besar.

Tak dipungkiri, pemilih pemula menjadi incaran kontestan Pemilu, baik partai politik ataupun secara personal pendukungnya. Pemilih pemilu dianggap rentan untuk dipengaruhi dan mudah diarahkan serta menjaring teman lainnya. Kebanyakan dari pemilih pemula masuk kategori dengan latar belakang semu, dimana masih ikut-ikutan seperti teman seusia, sehingga masih rawan dipengaruhi jalan pikirannya. Sebagai generasi penerus, mereka harus belajar dan dipahamkan tentang pentingnya

³ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, (hlm : 139-140)

Pemilu untuk mendorong rasa partisipasi yang tinggi, sebab menjadi pengalaman pertama dalam keikutsertaan pesta demokrasi yang turut menentukan nasib bangsa ke depan.

Sementara itu, Pemilu serentak tak lama akan digelar pada tahun 2024 tepatnya di tanggal 14 Februari. Dua tahun lagi Indonesia menggelar pesta demokrasi ini yang membuat antusiasme kalangan politisi berlomba menggaet suara pemilih utamanya bagi mereka yang pemula. Sejumlah survey menggambarkan bahwa generasi milenial termasuk generasi Z diperkirakan menjadi kelompok dengan porsi terbesar pada pemilu tersebut. Pemilih milenial berada pada rentang usia antara 17 sampai 37 tahun, dan diprediksi pemilih muda ini bakal mengalami peningkatan. Mengacu pada pemilu 2019, data KPU menunjukkan jumlah pemilih muda mencapai 70 juta hingga 80 juta orang dari total 193 juta pemilih. Artinya, 35% sampai 40% pemilih milenial memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap hasil pemilu. Namun, tak menutup kemungkinan persoalan lain yang terjadi dimana pemilih muda justru berpeluang menjadi penyumbang untuk Golput atau tak menggunakan hak pilihnya nanti di pemilu 2024.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari media Kompas bahwa pemilih dari kalangan generasi milenial dan generasi Z diprediksi bakal mendominasi Pemilu 2024, dimana dari DPT pemilu serentak 2019 pemilih berusia 20 tahun mencapai 17.501.278 jiwa, sementara yang berusia 21-30 tahun sebesar 42.843.792 orang. Olehnya pada pemilu 2024 nanti, jumlah pemilih milenial dan generasi Z bakal

⁴ <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>

meningkat sekitar 60 persen dari total suara⁵. Selain itu, berdasarkan survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama-sama Litbang menunjukkan begitu tinggi antusias kaum milenial, yakni mereka dengan rentang kelahiran 1981-1996 serta generasi Z yang lahir ditahun 1997-2012 untuk mengikuti Pemilu serentak 2024 nanti. Berdasarkan survey, sebanyak 86,7 % menyatakan kesediaannya berpartisipasi pada pemilu nanti. Sementara 10,7 % masih menimbang-nimbang dan 2,6 % lainnya menolak untuk mengikuti. Survei dengan menggunakan telepon pula dilakukan kepada 3.224 responden dengan usia 17 sampai 40 tahun dan tersebar di 80 daerah pemilihan pada awal tahun 2022, dimana sampel yang diambil menggunakan metode acak dan menghasilkan tingkat kepercayaan hingga 95 %, sementara *margin in error* kurang lebih 1,79 % terhadap pemilu.

Antusiasme kaum milenial serta generasi Z dalam mengikuti pemilu muncul pada semua daerah pemilihan, dimana dari 80 dapil yang dikelompokkan pada 6 wilayah, menunjukkan keinginan responden mengikuti di atas 85 %. Seperti, Bali 92 %, Jawa 85 %, Kalimantan 90 %, Maluku dan Papua 90 %, Sulawesi 91 % dan Sumatera 86 %.⁶ Ditetapkannya jadwal pemungutan suara pada pemilu 2024 memberikan kepastian para calon dan kontestan untuk menyusun strategi pemilu khususnya dalam menggaet pemilih pemula atau pemilih milenial. Memahami pemilih ini sangat penting, terutama penyiapan perangkat untuk menjangkaunya. Pemilih milenial dapat menjadi populer dikalangan para kontenstan, sehingga perlu

⁵ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik>

⁶ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>

dibekali dengan pendidikan politik yang mumpuni agar tidak membawa efek kerugian bagi diri sendiri bahkan meluas ke negara.

Lemahnya kepedulian perihal politik oleh pemilih pemula disebabkan anggapan bahwa siswa maupun mahasiswa awal semester mesti netral dalam politik, bahkan terbungkam oleh aktivitas pendidikan. Olehnya, mengingat betapa pentingnya peran anak muda dalam menentukan arah dan masa depan bangsa sehingga dituntut memiliki pemahaman dan pendidikan berkaitan dengan dunia politik. Berkaitan dengan generasi muda sebagai pemilih milenial khususnya di lingkungan difokuskan pada generasi Z, yakni mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai tahun 2012. Tahun kelahiran generasi Z memiliki beberapa versi namun yang pasti mereka telah terpapar akses teknologi dan internet sejak dini. Berdaarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah generasi Z di Indonesia mencapai 74.93 juta jiwa atau 27,94 persen dari total penduduk. Aset ini tentu harus diberdayakan secara optimal melalui pendidikan politik.

Seluruh lapisan rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.⁷ Sebab, negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat termasuk kalangan muda Indonesia.⁸ Olehnya, partisipasi semua masyarakat sangat penting, sebab Pemilu sendiri adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak

⁷ 1A.Ubaedillah dan Abu Razak, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202.

⁸ 1 Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 116

sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat).⁹

Oleh karena itu, tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat khususnya para pemilih pemula penting ditingkatkan dalam proses demokrasi ditahun 2024 mendatang, melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan tema **“Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah)”**

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka program dalam kegiatan Pengabdian Kolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula.
2. Penguatan hubungan kemitraan dengan sekolah.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Program

1. Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Memberi sumbangsi pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat maupun siswa untuk kemajuan pembangunan daerah dan bangsa.
3. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.
4. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat.

⁹ S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), h. 5-14

BAB II

TARGET DAN LUARAN PROGRAM

2.1 Target

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum muda milenial dalam kegiatan politik guna mewujudkan proses demokrasi di negara Indonesia.
2. Menyiapkan kaum pemuda selaku pemilih pemula yang partisipatif dalam pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 dan diwaktu-waktu mendatang.
3. Kaum pemuda/pemudi memahami dan menguasai regulasi berkaitan dengan hukum Kepemiluan yang berlaku di Indonesia.
4. Target jangka panjang ialah mewujudkan demokrasi yang utuh pada semua lapisan masyarakat.
5. Terjalinnnya kemitraan Fakultas Hukum dengan pihak sekolah.

2.2 Luaran Program

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah:

1. Penyuluhan Hukum kepada Siswa/siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom.
2. Poster kegiatan
3. *Implementation Agreement* (IA) antara FH UNG dan Pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom.

4. Laporan Wajib :

- Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian
- Buku Catatan Harian Kegiatan (Log Kegiatan)
- Buku Catatan Keuangan (Log Keuangan)

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Perencanaan Kegiatan Pengabdian.
 - b. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
 - c. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - d. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.

2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik serta Pendanaan.
 - b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.

- c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.
 - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
- a. Pelepasan oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
 - b. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan kepada tim dan mahasiswa.
 - c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
 - d. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif.

3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut uraian program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

Tabel Program Kerja

| Lingkup Program | Kegiatan |
|------------------|---|
| Penyuluhan Hukum | .1 Melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Pihak Sekolah. .2 Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan .3 Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Diskusi Berkenaan dengan Masalah partisipasi politik |

| | |
|-----------------------------|--|
| Pendampingan Terhadap Siswa | Memberi saran dan atau rekomendasi berkenaan dengan persoalan yang dihadapi siswa dalam pemenuhan hak politik mereka |
|-----------------------------|--|

3.3 Rencana Aksi Program

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif.

Adapun jam kerja sebagai berikut:

| No | Nama Pekerjaan | Program | Volume (JKEM) |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| 1 | Melakukan sinkronisasi jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama, sekaligus persiapan pelaksanaan program. | Inventarisasi Program | 5 Jam (1 hari) |
| 2 | Pelaksanaan Penyuluhan Hukum. | Penyuluhan | 5 (1 hari) |
| 3 | Pendampingan kepada siswa | Pendampingan | 5 (1 hari) |
| 4 | Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian | Persiapan Penarikan | 5 (1 hari) |
| 6 | Penyusunan Laporan Kegiatan | Menyusun Laporan | 10 (2 hari) |
| Total Volume Kegiatan | | | 30 |

BAB IV

HASIL KEGIATAN

4.1. Profil Sekolah

SMA Negeri 1 Kintom adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Dimpalon, Kec. Kintom, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Kintom berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri 1 Kintom didirikan melalui SK Pendirian Sekolah No. 421.3/1.983/DIS-PDK pertanggal 10 Oktober 2019. SMA Negeri 1 Kintom terakreditasi A dengan nomor SK 1344/BAN-SM/SK/2019.

4.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan inti dari pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif ini adalah penyuluhan terkait partisipasi politik pemilih pemula, khususnya yang berada di SMA Negeri 1 Kintom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kepemiluan kepada Siswa SMA Negeri 1 Kintom dimana tujuan akhirnya adalah lahirnya kesadaran bagi siswa untuk berpartisipasi dalam setiap proses atau tahapan pemilihan umum. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan:

1. Penyuluhan

Penyuluhan terkait “Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah” dihadiri oleh guru dan siswa SMA Negeri 1 Kintom bertempat di salah satu ruang kelas sekolah. Abdul Hamid Tome, SH., MH yang bertindak sebagai pemateri menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, para siswa yang telah

masuk pada level pemilih pemula harus memahami betul peran strategis keberadaan mereka. Jika keputusan memilih calon pemimpin atau partai politik tidak digunakan atau salah digunakan maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karenanya, para siswa perlu dibekali pemahaman terkait apa itu politik, pemilihan umum, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, dan tanggungjawab bernegara. Sehingga kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada siswa selaku generasi muda sekaligus pemilih pemula dengan harapan para siswa dapat menjalankan hak konstitusional yang mereka miliki dalam memperkuat sistem demokrasi negara. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini para pemilih pemula dapat menjadi generasi yang cerdas tidak hanya di dalam kelas tetapi juga cerdas secara politik dalam menyalurkan aspirasi sekaligus mengawal proses demokrasi.

Pada akhir materi, narasumber menyampaikan agar para siswa tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks yang dapat memecah persatuan dan keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu termasuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat adanya perilaku menyimpang atau kecurangan yang dilakukan oleh tim pemengangan atau pasangan calon, atau partai politik, dan terakhir mendorong siswa agar menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pencoblosan.

Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari pihak sekolah, siswa terlibat aktif dalam proses diskusi atau pendalaman materi.

2. Pemberian poster kegiatan

Pada akhir kegiatan, tim yang turun dilokasi memperlihatkan setiap tahapan yang dilakukan oleh para siswa dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Setiap tahapan tersebut telah dikemas oleh tim dalam bentuk poster yang juga diserahkan kepada pihak sekolah sebagai media sosialisasi kepada para siswa.

3. Penandatanganan naskah implementasi kegiatan kerja sama

Setelah melaksanakan kegiatan, tim beserta pihak sekolah melakukan penandatanganan dokumen implementasi kegiatan kerja sama sebagai upaya meningkatkan hubungan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan SMA Negeri 1 Kintom.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kolaboratif di SMA Negeri 1 Kintom Kabupaten Banggai mendapat respon positif dari siswa dan pihak sekolah. Program yang telah disusun berjalan dengan baik berkat kerjasama dengan pihak sekolah.

5.2. Saran

Agar terjadi keberlanjutan pada kegiatan ini, diharapkan agar:

1. Pihak sekolah dapat memberikan penguatan materi terkait hak politik peserta didik melalui materi pembelajaran yang terkait.
2. Diperlukan media yang adaptif dengan kondisi generasi muda sebagai wadah dalam mensosialisasikan hak-hak politik generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A.Ubaedillah dan Abu Razak, *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003)

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerbit Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Jimly Asshddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981)

<https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-pemilu-2024>

Lampiran 1a: Biodata Ketua Tim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H
2. NIP : 198405012015041002
3. Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 Mei 1984
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Fakultas : Hukum
6. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
7. Alamat Rumah : Jl. Teknik, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo

B. Pendidikan

:

| NO | PERGURUAN TINGGI | GELAR | TAHUN SELESAI | BIDANG STUDI |
|----|---------------------------|-------|---------------|--------------|
| 1 | Universitas Sam Ratulangi | SH | 2007 | Ilmu Hukum |
| 2 | Universitas Sam Ratulangi | MH | 2012 | Ilmu Hukum |

C. Pengalaman Penelitian

| NO | JUDUL | TAHUN | JABATAN |
|----|--|-------|---------|
| 1 | Implementasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo | 2013 | Ketua |
| 2 | Survey Persepsi Partisipasi Pegawai Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo | 2015 | Ketua |
| 3 | Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo | 2015 | Anggota |
| 4 | Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di | 2016 | Anggota |

| | | | |
|----|---|------|---------|
| | Kabupaten Gorontalo | | |
| 5 | Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo | 2017 | Anggota |
| 6 | Efektivitas Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo | 2018 | Anggota |
| 7 | Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan | 2019 | Anggota |
| 8 | Kajian Akademik Penataan Wewenang dan Tugas MPR | 2019 | Anggota |
| 9 | Rekonstruksi Model Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa | 2020 | Anggota |
| 10 | Penguatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa: Upaya Pengembangan Demokrasi Lokal | 2020 | Ketua |
| 11 | Kajian Akademik Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara | 2021 | Anggota |
| 12 | Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Teluk Tomini | 2021 | Ketua |
| 13 | Menggagas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis Melalui Pengawasan Partisipatif | 2022 | Ketua |

D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

| NO | JUDUL | TAHUN | JABATAN |
|----|--|-------|------------|
| 1 | <i>FGD</i> “Naskah Akademik dan Ranperda tentang Bangunan Gedung Kab. Gorontalo Utara” | 2015 | Pembicara |
| 2 | <i>FGD</i> “Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Gorontalo” | 2016 | Pembicara |
| 3 | Penyuluhan Hukum | 2017 | Pembicara |
| 4 | Penyuluhan Hukum “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat” | 2018 | Pembicara |
| 5 | <i>FGD</i> “Naskah Akademik Ranperda Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan” | 2019 | Pembicara |
| 6 | KKS Sibermas “Karang Taruna Hadirkan Perubahan Ekonomi Masyarakat Desa Hulawa Kec. Paguyaman” | 2019 | DPL |
| 7 | KKN Tematik “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” | 2020 | DPL |
| 8 | Pemberdayaan Kelompok Difabel Dengan Metode Rumah Inovasi Difabel (Rumivabel) | 2020 | Pembimbing |
| 9 | Pendampingan Desa Pilohayanga Dengan Program INDEKSI (Inovasi Desa Inklusi) Ramah Difabel | 2021 | Pembimbing |

E. Pengalaman Profesional Serta Jabatan Saat Ini

| NO | INSTITUSI | JABATAN | TAHUN |
|----|--|---------|----------------------|
| 1 | Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo | Ketua | 2017 |
| 2 | Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo | Anggota | 2015 s/d sekarang |
| 3 | Bidang Hukum Tata Negara | Ketua | 2019-2023 |

F. Publikasi Artikel Ilmiah

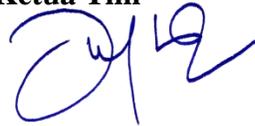
| NO | JUDUL | NAMA JURNAL | TAHUN TERBIT |
|----|--|---|-----------------|
| 1 | Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 | Jurnal Hukum Unsrat | 2012 |
| 2 | Kedudukan Hukum GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 9, No. 1. | 2016 |
| 3 | Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo | Maksigama Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1. | 2017 |
| 4 | Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo | Jambura Law Review Vol. 1, No. 1 | 2019 |
| 5 | Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online | Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2 | 2019 |

| | | | |
|----|--|--|------|
| 6 | The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture | Prosiding EAI | 2019 |
| 7 | Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa | Jurnal Al-'Adl Vol. 13, No. 1 | 2020 |
| 8 | Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya | Jurnal Al-Ahkam, Vol. 16, No. 1 | 2020 |
| 9 | Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden | Jurnal Majelis Edisi 08 | 2020 |
| 10 | Conceptual Review of Local Wisdom in Law Number 6 of 2014 Concerning Village | Journal of Critical Reviews, Vol. 7, Issue 11 | 2020 |
| 11 | Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jurnal Al-Adalah, Vol. 6, No. 1 | 2021 |
| 12 | Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak | Jurnal Widya Yuridika, Vol. 4, No. 1 | 2021 |
| 13 | Diskriminasi Rasial dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional | Jurnal Legalitas, Vol. 14, No. 1 | 2021 |
| 14 | Dynamics of Village Head Election Arrangements | Jambura Law Review, Vol. 3 | 2021 |
| 15 | Completing the empty room for legal control of drug and food control in the region | IOP Publishing | 2021 |

| | | | |
|----|--|----------------|------|
| 16 | Consequences of Assimilation Policy During a Pandemic in Indonesia: Overview in Human Rights Perspective | Atlantis Press | 2021 |
|----|--|----------------|------|

Gorontalo, Juli 2023

Ketua Tim



Abdul Hamid Tome, SH., MH

NIP. 198405012015041002

Lampiran 1b: Biodata Anggota

A. Identitas Diri

| | | |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap Dengan Gelar | Nuvazria Achir, S.H.,M.H |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 4 | NIP/Identitas Lainnya | 19851005201803 2 001 |
| 5 | NIDN | 0005108502 |
| 6 | ID SINTA | 6677725 |
| 7 | Tempat Tanggal Lahir | Gorontalo, 05 Oktober 1985 |
| 8 | E-mail | ulfa@ung.ac.id |
| 9 | Nomor Telepon/HP | 085240740740 |
| 10 | Alamat Kantor | Jln. KH. Abas Rauf, Desa Bulotalangi Barat Kec.Bulango Timur (Kab. Bone Bolango) |
| 11 | No. Telepon/Faks | 0435-821752 |
| 12 | Mata Kuliah Yang Diampuh | <ol style="list-style-type: none">1. Ilmu Negara2. Hukum Tata Negara3. Hukum Administrasi Negara4. Ilmu Perundang-undangan5. Praktek Perancangan Perundang-undangan6. Hukum Acara MK7. Hukum Acara PTUN8. Praktek Peradilan TUN9. Hukum dan HAM10. Teori dan Hukum Konstitusi11. Pancasila12. Kewarganegaraan |

B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 |
|------------------------------|--|--|
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Gorontalo | Universitas Muslim Indonesia Makasar |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum | Hukum Tata Negara |
| Tahun lulus | 2012 | 2014 |
| Judul Skripsi/Tesis | Analisis Yuridis Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo ditinjau dari UU No. 14 tahun 2008 | Eksistensi Ketetapan MPR dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia |
| Nama Pembimbing | Prof. Johan Jasin.,SH.,MH | Prof. Sufirman Rahim., SH.,MH |

C. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis)

| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|----|-------|--|---|-------------------|
| | | | Sumber | Jumlah |
| 1 | 2018 | Perlindungan Hak Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi Di Kota | PNBP (Kolaborasi) Sebagai Anggota | Rp. 15.000.000 |
| 2 | 2019 | Analisis politik hukum materi muatan ajaran islam dalam peraturan daerah Di Provinsi Gorontalo | PNBP (Kolaborasi) Sebagai Anggota | Rp. 10.000.000 |
| 3 | 2020 | Studi Pelaksanaan Otonomi Daerah | PNBP (Kolaborasi) | RP. 12.500.000 |

| | | | | |
|---|------|---|--|-------------------|
| | | Terhadap Kedudukan Peraturan Daerah Bernuansa <i>Syari'ah</i> Di Provinsi Gorontalo | Sebagai Ketua | |
| 4 | 2021 | Efektivitas Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Korban Eksploitasi Di Kota Gorontalo | PNBP (Kolaborasi) Sebagai Ketua | RP. 25.000.000 |
| 5 | 2022 | Pengaruh Penerapan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Provinsi Gorontalo | PNBP (Kolaborasi) Sebagai Ketua | RP. 25.000.000 |
| 6 | 2022 | Pengaruh Kebijakan Pelaksanaan Pilkades Melalui Sistem <i>E-Voting</i> Di Kabupaten Boalemo | PNBP (Kolaborasi) Sebagai Anggota | RP. 8.500.000 |
| 7 | 2023 | Optimalisasi Penyelenggaraan Demokrasi Melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa | Penelitian Mandiri Sebagai Anggota | - |
| 8 | 2023 | Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perda Pengelolaan Zakat (Studi Perda No. 6 Tahun 2015 Di Kabupaten Pohuwato) | PNBP (Kolaborasi) Sebagai Ketua | RP. 10.000.000 |

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
|----|-------|---|---------------------------|---------------------|
| | | | Sumber | Jumlah |
| 1 | 2019 | Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Tema : Kesadaran Hukum dalam Keluarga | PNBP (Sebagai Anggota) | Rp. 20.000.000,- |
| 2 | 2019 | Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Tema : Bank Sampah Desa | PNBP (Sebagai Anggota) | Rp. 20.000.000,- |
| 3 | 2020 | Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Gorontalo | LKBH PGRI Pemateri | Rp. 3.000.000,- |
| 4 | 2020 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tema : Pengembangan Desa Sehat Melalui Pembentukan Gugus Tugas Dan Sosialisasi Pencegahan Stunting Serta Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan Di desa buntulia tengah, kabupaten pohuwato | PNBP (Sebagai Anggota) | Rp. 25.000.000,- |
| 5 | 2020 | Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia (Tinjauan Pasal 23 E Ayat 3 UUD NRI 1945) | MPR RI Pemakalah | Rp. 2.000.000,- |
| 6 | 2021 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | PNBP (Sebagai | Rp. |

| | | | | |
|---|------|---|--|------------------|
| | | Tematik dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Biluhu Timur Melalui Pengembangan & Penataan Dewita (Desa Wisata)” | Anggota) | 12.500.000,- |
| 7 | 2021 | Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNG, dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Terhadap Pengelolaan BUMDES di Desa Biluhu Timur | PNBP/ RBA Fakultas Hukum (Sebagai Ketua) | Rp. 10.000.000,- |
| 8 | 2022 | Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Pemahaman Hukum Adat Masyarakat Pesisir Di Desa Botu Bolu’o Kecamatan Biluhu | PNBP/ RBA Fakultas Hukum (Sebagai Ketua) | Rp. 10.000.000,- |
| 9 | 2022 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Legalisasi Industri Rumah Tangga Di Desa Bendungan Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo | PNBP/ (Sebagai Anggota) | Rp. 12.500.000,- |

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|----|--|--|--------------------------------|
| 1 | FGD MPR RI | Dampak Budaya Generasi Milenial terhadap Ketahanan Bangsa dan bentuk Nasionalisme Zaman <i>Now</i> | Gorontalo, 2018 |
| 2 | FGD MPR RI | Terang-Gelap Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Indonesia (Tinjauan Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI 1945) | Dalam Diskusi (September 2020) |
| 3 | FGD Virtual Jurnal MPR RI | Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia (Tinjauan Pasal 23 E Ayat 3 UUD NRI 1945) | Gorontalo, 2020 |
| 4 | BENCOOLEN INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW STUDIES (BICoLS) | The Impact Of The Assimilation Policy On Prisoners And Underage Prisoners For The Prevention And Control Of The Spread Of Covid-19 | (Virtual) Bengkulu, 2021 |
| 5 | INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW REFORM (<i>INCLAR</i>) | Impact Of Enforcement Sharia Regional Regulations During The Covid-19 Pandemic. | (Virtual) Malang, 2022 |

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| 6 | UNIMA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (UNICSSH) | Political Education Strategy for Millennial Voters in Higher Education | Manado, 2022 |
|---|---|--|--------------|

F. Pemateri *Diskusi*

| No | Nama Pertemuan | Judul Materi | Waktu dan Tempat |
|----|----------------|--|------------------|
| 1 | Diskusi Ilmiah | Refleksi Semangat Kebinekaan, Guna Mewujudkan Masyarakat Anti Rasisme | Gorontalo, 2019 |

G. Karya Ilmiah : Jurnal/Buku /Bahan Ajar

| No | Karya Ilmiah | Judul Materi | Tahun |
|-------------|--------------|---|--|
| 2019 | | | |
| 1 | Jurnal | The Islamic Taste in Laws and Regulations Establishment: Case of Gorontalo Province, Indonesia | Gorontalo, 2019 Jurnal Unnes (SINTA 4) |
| 2 | Jurnal | Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi | Gorontalo, 2019 Jalrev (SINTA 2) |
| 3 | Jurnal | Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana | Gorontalo, 2019 (JELTA) |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| | | Perjudian Togel Online | |
| 2020 | | | |
| 1 | Bahan Ajar/HKI | Ilmu Negara | Gorontalo, 2020 |
| 1 | Jurnal | Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Serta Kewajiban Pemerintah Daerah | Gorontalo, 2020 (SINTA 3) |
| 3 | Jurnal Majelis (MPR-RI) | Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia | Jakarta, 2020 |
| 4 | Jurnal | Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara | Gorontalo, 2020 (JELTA) |
| 2021 | | | |
| 1 | Jurnal | The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In | Gorontalo, 2021 Jalrev (SINTA 2) |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | The Regions | |
| 2 | <i>Book Chapter International</i> | <i>Rights Of Construction Service Industry Workers in Gorontalo City</i> | Nova Science Publishers, 2021 |
| 3 | Jurnal | Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo | Gorontalo Law Review, Oktober 2021 (SINTA 4) |
| 2022 | | | |
| 1 | Jurnal | Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation | Jalrev, Januari 2022 (SINTA 2) Volume 4 Issue 01 |
| 2 | Prosiding, April 2022 http://fh.unib.ac.id/proceedings-of-bencoolen-international-conference-on-law-studies-rule-of-law-democracy-and-human-rights-amidst-pandemic-era/ | The Impact Of The Assimilation Policy On Prisoners And Underage Prisoners For The Prevention And Control Of The Spread Of Covid-19 | <i>Proceedings of Bencoolen International Conference on Law Studies : Rule of Law, Democracy and Human Rights amidst Pandemic Era,</i> |

| | | | |
|-------------|-----------|--|--|
| | | | <i>Bengkulu, 28 October 2021</i> |
| 3 | Prosiding | Impact of Enforcing Sharia Regional Regulations During the Covid-19 Pandemic | INCLAR, KNE |
| 4 | Jurnal | The Contribution of Custom Institutions in Implementing Custom Sanctions in Gorontalo | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 20 (2), 226-236, (SINTA 2) |
| 2023 | | | |
| 1 | Prosiding | Political Education Strategy for Millennial Voters in Higher Education | ATLANTIS |
| 2 | Jurnal | The Problem of Fulfilling Voter Rights in Village Head Elections Is Based On E- Voting | Jambura Law Review 5 (1), 156-178 (SINTA 2) |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,



Nuvazria Achir, SH.,MH

NIP. 19851005201803 2 001

Lampiran 1c: Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap Dengan Gelar | Weny A. Dungga, SH.,MH |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| 4 | NIP/Identitas Lainnya | 196805222001121001 |
| 5 | NIDN | 0022056806 |
| 6 | Tempat Tanggal Lahir | Gorontalo, 22 Mei 1968 |
| 7 | E-mail | weny.dungga@gmail.com |
| 8 | Nomor Telepon/HP | 081340812222 |
| 9 | Alamat Kantor | Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo |
| 10 | No. Telepon/Faks | 0435-821752 |
| 11 | Mata Kuliah Yang Diampuh | <ol style="list-style-type: none">1. Hukum Perdata2. Hukum Acara Perdata3. Hukum Pajak4. Hukum Ketenagakerjaan5. Hukum Agraria |

B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 | S-3 |
|--------------------------------------|---|---|-----|
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Samratulangi- Manado | Universitas Hasanudin Makasar | - |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum | Hukum Perdata | - |
| Tahun lulus | 1986 | 2006 | - |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Proses Gadai Tanah Menurut UU No. 56 PPS 1960 di Kecamatan Kabila | Analisis Terhadap Perwakafan Tanah Milik di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo | - |
| Nama Pembimbing/Promotor | Ma'ruf Hafidz, SH.,MH | Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH.,MH | - |

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|----|-------|--|-----------|------------|
| | | | Sumber | Jumlah |
| 1 | 2011 | Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Wanita formal Di Kota Gorontalo | PNBP | 10.000.000 |

| | | | | |
|---|------|---|------|------------|
| 2 | 2014 | Perlindungan Hak-Hak Buruh Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Kota Gorontalo | PNBP | 10.000.000 |
| 3 | 2016 | Evaluasi Tugas dan Wewenang BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 | PNBP | 10.000.000 |
| 4 | 2017 | Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo | PNBP | 10.000.000 |
| 5 | 2018 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Daerah | PNBP | 20.000.000 |
| 6 | 2019 | Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan | PNBP | 10.000.000 |

| | | | | |
|---|------|--|---------|------------|
| 7 | 2020 | Status Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Oleh Masyarakat Di Sekitaran Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo | PNBP | 12.500.000 |
| 8 | 2021 | Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Teluk Tomini | PNBP FH | 25.000.000 |
| 9 | 2022 | Menggagas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis Melalui Pengawasan Partisipatif | PNBP FH | 25.000.000 |

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.

| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
|----|-------|---|-----------|------------|
| | | | Sumber | Jumlah |
| 1 | 2014 | Pelatihan Pembuatan peraturan desa dan Pelatihan Perancangan surat-surat perjanjian di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo | PNBP | 25.000.000 |

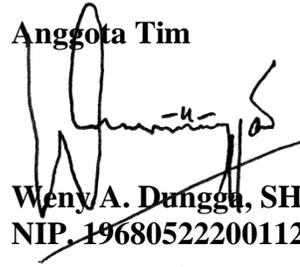
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

| No | Judul artikel | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
|----|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | Penerapan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan | Jurnal Legalitas | Vol. 4 No 1, Februari 2011 |
| 2 | Komplain Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Sering Padamnya Listrik di Kota Gorontalo | Jurnal Legalitas | Vol. 4 No. 2, Agustus 2011 |
| 3 | Wewenang Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan | Jurnal Legalitas | Vol. 5 No. 2, Oktober 2012 |
| 4 | Gerakan Pembaharuan Perjuangan Hak-Hak Kaum Perempuan di Era Demokratisasi | Jurnal Legalitas | Vol. 6 No. 2, Oktober 2013 |
| 5 | Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo | Jambura Law Review | Vol. 1, No. 1, 2019 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Weny A. Dungga', with a horizontal line drawn through it.

Weny A. Dungga, SH.,MH
NIP. 196805222001121001



IMPLEMENTASI KEGIATAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KINTOM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PENYULUHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KINTOM KABUPATEN BANGGAI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023) bertempat di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Abdul Hamid Tome: Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus sebagai Ketua Tim Penyuluhan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Jamaris Madina: Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom berkedudukan di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Implementasi Kegiatan Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan Penyuluhan Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom Kabupaten Banggai.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2023.
3. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab memberikan penyuluhan kepada Siswa SMA Negeri 1 Kintom.
4. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, berupa: kehadiran peserta (siswa) dan tempat pelaksanaan kegiatan.
5. Pembiayaan kegiatan berasal dari **PIHAK KESATU**.

Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Abdul Hamid Tome



PIHAK KEDUA

Jamaris Madina

Mengetahui:

**Ketua Program Studi
Fakultas Hukum UNG**

Jufriyanto Puluhulawa

**Dekan
Fakultas Hukum UNG**

Fenty U. Puluhulawa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

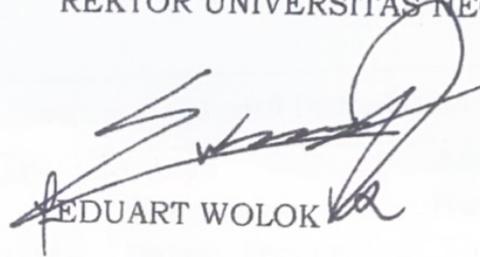
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO TAHUN 2023

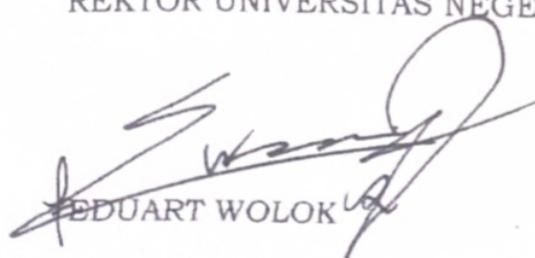
NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

| No. | Nama Dosen dan Mahasiswa | Judul Pengabdian | SKIM |
|-----|--|--|------------------------------|
| 1. | Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha | Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 2. | Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain | Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 3. | Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 4. | Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota) | Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |

| No. | Nama Dosen dan Mahasiswa | Judul Pengabdian | SKIM |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 5. | Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika | Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 6. | Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar | Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024 | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 7. | Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim | Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 8. | Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud | Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 9. | Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R. | Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |

| No. | Nama Dosen dan Mahasiswa | Judul Pengabdian | SKIM |
|-----|---|--|------------------------------|
| | 2. Putri Ramadhanti Anton Taha | | |
| 10. | Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam | Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 11. | Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu | Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 12. | Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar | Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |
| 13. | Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho | Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo | Kolaborasi Dosen & Mahasiswa |

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK